



**ANALISIS  
INDIKATOR MAKRO  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2017**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA SAMARINDA**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Buku Indikator Makro Tahun 2017. Buku Indikator Makro ini berisikan data-data mengenai pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, dan pendapatan perkapita.

Pemahaman yang menandai tentang indikator pembangunan daerah ini diharapkan dapat semakin terarahnya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, juga diharapkan semakin tingginya responsi masyarakat dalam mensukseskan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian terutama dari pihak pengambilan keputusan karena proses panjang perjalanan bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan yang harus mendapat perhatian dari kita semua.

Kami menyadari buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Terima kasih.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI.....</b>	<b>I-1</b>
<b>BAB 2 PERTUMBUHAN PENDUDUK.....</b>	<b>II-1</b>
<b>BAB 3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).....</b>	<b>III-1</b>
<b>BAB 4 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA.....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB 5 TINGKAT KEMISKINAN.....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB 6 TINGKAT INFLASI .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB 7 PENDAPATAN PERKAPITA.....</b>	<b>VII-1</b>

# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1. PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB dengan Migas Tahun 2012-2016 .....</b>	<b>I-2</b>
<b>Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstant Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 .....</b>	<b>I-3</b>
<b>Tabel 1.3. Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2012-2016 (%) .....</b>	<b>I-4</b>
<b>Tabel 2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 201-2016.....</b>	<b>II-3</b>
<b>Tabel 3.1. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2012-2016 .....</b>	<b>III-2</b>
<b>Tabel 3.2. Pengeluaran Perkapita Kota Samarinda Tahun 2014-2016.....</b>	<b>III-6</b>
<b>Tabel 4.1. Pengangguran Terbuka di Kota Samarinda Tahun 2012-2016.....</b>	<b>IV-6</b>
<b>Tabel 5.1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2017 .....</b>	<b>V-3</b>
<b>Tabel 6.1. Inflasi Kota Samarinda Tahun 2013-2017 .....</b>	<b>VI-4</b>
<b>Tabel 6.2. Inflasi Kota Samarinda Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2013-2017 .....</b>	<b>VI-4</b>
<b>Tabel 7.1. Pendapatan Perkapita Kota Samarinda Tahun 2012-2016 .....</b>	<b>VII-2</b>

# PERTUMBUHAN EKONOMI

1

## 1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2009). Dalam konteks Negara, Pertumbuhan ekonomi suatu negara (*rate of economic growth, rog*) dihitung dengan:

$$Rog = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:

$PDB_t$  = Produk Domestik Bruto suatu Negara pada tahun  $t$ ;

$PDB_{t-1}$  = Produk Domestik Bruto pada tahun  $t-1$

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sama besarnya dengan besarnya produksi yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDRB pada tahun tertentu terhadap PDRB tahun wilayah sebelumnya.

PDRB disajikan dalam 2 (dua) konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan, perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan konsep harga konstan (*constant prices*) dengan tahun dasar tertentu

untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Saat ini BPS menggunakan tahun dasar 2010.

Nilai tambah juga merupakan balas jasa faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal, dan *entrepreneurship* yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB hanya mempertimbangkan domestik, yang tidak memperhatikan kepemilikan faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda baik melalui harga yang berlaku maupun harga konstant dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 1.1. PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB dengan Migas Tahun 2012-2016**

Tahun	PDRB Dengan Migas (Jt - Rp)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Berlaku	Konstant Tahun 2010	Berlaku	Konstant Tahun 2010
2012	41.242.817,59	35.711.573,43	-0,97	0,50
2013	44.824.302,00	37.471.852,60	8,68	4,93
2014	48.273.715,40	39.506.305,30	7,70	5,42
2015	50.802.369,20	39.523.223,10	5,24	0,04
2016	52.266.340,10	39.614.101,90	2,88	0,23
<b>Rata-rata Pertumbuhan</b>			<b>4,71</b>	<b>2,22</b>

Sumber : Data diolah, 2017

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda, apabila memasukkan unsur migas dengan harga berlaku, rata-rata tumbuh sebesar 4,71% per tahun, sedangkan apabila dilihat dengan harga konstan, rata-rata tumbuh sebesar 2,22% per tahun. Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda dari tahun 2012 sampai 2016, terlihat bahwa terjadi penurunan tahun 2015 yang hanya sebesar 0,04%. Namun pada tahun tersebut, banyak daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi bernilai negative, yang artinya terjadi kemunduran ekonomi. Hal ini menandakan bahwa

perekonomian Kota Samarinda sangat kokoh ditengah-tengah gejolak naik turunnya harga migas dunia.

Kota Samarinda memang termasuk kota yang bukan penghasil migas atau bukan kota pengolah migas, Kota Samarinda dalam visi dan misinya lebih berorientasi pada kota jasa dan perdagangan, hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sektoral sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstant Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012–2016 (%)**

NO	SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian	0,18	10,17	3,73	8,45	-1,83
B	Pertambangan & Penggalian	-19,86	4,93	0,36	-13,89	2,35
C	Industri Pengolahan	-0,99	2,09	2,37	3,02	-0,46
D	Pengadaan Listrik, Gas	18,92	3,09	18,38	8,54	5,53
E	Pengadaan Air	3,73	8,92	6,57	4,32	6,65
F	Konstruksi	7,19	5,23	6,97	-1,98	-3,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,52	-0,05	7,12	2,27	2,39
H	Transportasi dan Pergudangan	4,97	6,40	6,34	2,39	-1,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,72	5,40	7,10	9,32	3,01
J	Informasi dan Komunikasi	13,68	5,11	8,25	6,99	9,25
K	Jasa Keuangan	14,71	13,16	8,32	4,73	1,17
L	Real Estate	9,45	12,55	13,40	4,22	-8,57
M,N	Jasa Perusahaan	12,73	8,02	5,21	-3,55	-2,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,65	2,90	2,65	5,78	-5,61
P	Jasa Pendidikan	23,02	10,12	6,46	10,38	7,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,96	2,50	8,90	9,20	9,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,04	4,58	4,99	5,93	9,31
<b>PDRB</b>		<b>0,50</b>	<b>4,93</b>	<b>5,32</b>	<b>0,01</b>	<b>0,23</b>

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2017

## 1.2. Struktur Ekonomi Kota Samarinda

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi. Struktur ekonomi yang disajikan dari waktu ke waktu memperlihatkan perubahan dan pergeseran sebagai indikator adanya proses pembangunan. Struktur ekonomi Kota Samarinda selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 telah banyak mengalami pergeseran.

Secara umum, pembentukan perekonomian Kota Samarinda (angka PDRB) secara perlahan dan pasti menuju Kota Pelayanan (*Service*). Perubahan perekonomian Kota Samarinda tersebut sangat dipengaruhi oleh naik turunnya sektor-sektor tersebut. Terlihat dengan adanya pergeseran kontribusi ekonomi Kota Samarinda dari tahun ke tahun, tampak seperti peranan sektor Pembuatan (*Manufacture*) terus mengalami penurunan. Dilihat dari tiga sektor besar, maka tampak adanya pergeseran yang signifikan antara Pertanian (*Agriculture*), Pembuatan (*Manufacture*) dan Pelayanan (*Service*).

Pergeseran terlihat pada peningkatan peranan sektor yang menghasilkan jasa meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa mencatat kontribusi (peranan).

**Tabel 1.3. Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2012-2016 (%)**

Jenis Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian / <i>Agriculture</i>	1,53	1,63	1,58	1,78	1,83
Pembuatan / <i>Manufacture</i>	48,17	46,64	44,51	41,94	41,17
Pelayanan / <i>Service</i>	50,30	51,74	53,92	56,3	57,01

Sumber : Data diolah, 2016

Sektor Pertanian (*Agriculture*) yang terdiri dari sub sektor pertanian bahan (tanaman) pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sektor *Manufacture* yang meliputi sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, serta sektor bangunan.

Sebaliknya terjadi kenaikan kontribusi dari peranan Sektor *Service* meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa bangunan serta sektor jasa.

Peranan sektor Pertanian (*Agriculture*) dalam perekonomian Kota Samarinda hanya sekitar 1,83% pada tahun 2016. Dapat dikatakan bahwa peranan sektor tersebut tidak signifikan dan cenderung menurun setiap tahun. Namun dari struktur sektor ekonomi inilah terlihat bahwa Kota Samarinda tergolong kota jasa dengan peranan sebesar 57% dan secara konstan menunjukkan peningkatan setiap tahun.

# PERTUMBUHAN PENDUDUK

2

## 2.1. Demografi

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia edisi *Balai Pustaka*, Demografi berarti ilmu kependudukan, ilmu tentang susunan, dan pertumbuhan penduduk, ilmu yang memberikan uraian atau lukisan berupa statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik.

Demografi berasal dari kata *demos*, artinya rakyat atau penduduk dan *graphien* berarti mencitra, menulis, melukis atau gambaran tentang penduduk pada suatu Negara atau wilayah.

Istilah demografi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli statistik Perancis yang bernama Achille Guillard. Dalam kertas kerjanya berjudul "*Elements do statistique Humaine au demographie Compare*" tahun 1855, sehingga beberapa sarjana demografi pada dekade berikutnya mengatakan pengertian demografi dengan lebih konkret dan logis.

Beberapa ahli demografi mengemukakan pendapat :

1. Menurut **Johan Susczmilch** (1762), demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Ilahi dalam perubahan-perubahan pada umat manusia yang tampak dari kelahiran, kematian dan pertumbuhannya.
2. Menurut **Achille Guillard**, demografi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur.
3. Menurut **George W. Barclay**, demografi adalah ilmu yang memberikan gambaran menarik dari penduduk yang

digambarkan secara statistika. Demografi mempelajari tingkah laku keseluruhan dan bukan tingkah laku perorangan.

4. Menurut **Phillip M. Hauser** dan **Dudley Duncan**, demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahan dan sebab-sebab perubahan tersebut.
5. Menurut **D.V. Glass**, demografi adalah ilmu yang secara umum terbatas untuk mempelajari penduduk yang dipengaruhi oleh proses demografis, yaitu : fertilitas, mortalitas dan migrasi.
6. Menurut **Donald J. Boague** (1973), demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistika dan matematika tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi, yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk atau dengan kata lain segala hal ihwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut seperti : kelahiran, kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu.

## 2.2. Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun tercatat kenaikan yang cukup berarti, pada tahun 2016 jumlah penduduk di Samarinda sebanyak 828.303 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Samarinda adalah 1.153,63 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola

persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Adapun data jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2012 sampai tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2012–2016**

Tahun	Jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) / Tahun	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
2012	764.908	1,09	718	1.065,33
2013	781.015	2,11	718	1.087,76
2014	797.015	2,05	718	1.110,05
2015	812.597	1,96	718	1.131,75
2016	828.303	1,93	718	1.153,63

Sumber : *Data diolah, 2017*

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tahun 2016 Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan sebesar 1,93% baik yang berasal dari faktor migrasi, kelahiran, maupun kematian.

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

3

IPM merupakan indeks gabungan dari tiga indikator : *longevity* sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak (*decent standard of living*) sebagaimana diukur oleh pengeluaran per kapita dan dinyatakan dalam PPP US\$. Ketiga indeks dalam laporan ini berdasarkan data BPS, terutama dari:

1. SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional).
2. Statistik Indonesia setiap tahun untuk informasi inti.
3. Modul Konsumsi setiap tiga tahun untuk informasi konsumsi.

Komponen *longevity* diukur dengan menggunakan indikator harapan hidup. Dalam laporan ini, harapan hidup di Indonesia dan 32 provinsi dihitung dengan menerapkan metode (Metode Brass, varian dari Trussel) berdasarkan variabel rata-rata jumlah kelahiran hidup dan jumlah rata-rata anak yang tetap hidup.

Komponen pengetahuan diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu : harapan lama sekolah dan rata-rata lama bersekolah. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator rata-rata lama sekolah adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan penduduk berusia 15 tahun atau lebih, yang dihitung dengan memasukkan dua variabel yaitu : gelar telah dicapai dan pencapaian tingkat pendidikan (*attainment of education level*).

Komponen standar hidup layak diperoleh dengan menggunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. UNDP memakai

pengeluaran per kapita dengan perhitungan paritas daya beli (PPP US\$) sebagai perbandingan internasional komponen ini.

Berdasarkan prosedur di atas IPM dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Dimana:

$I_{kesehatan}$  : Indeks harapan hidup kelahiran

$I_{pendidikan}$  : rata-rata dari indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah

$I_{pengeluaran}$  : Indeks pengeluaran per kapita

Dari indeks pembangunan manusia Kota Samarinda dari tahun 2012–2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2012-2016**

Tahun	IPM
2012	77,34
2013	77,84
2014	78,39
2015	78,69
2016	78,95

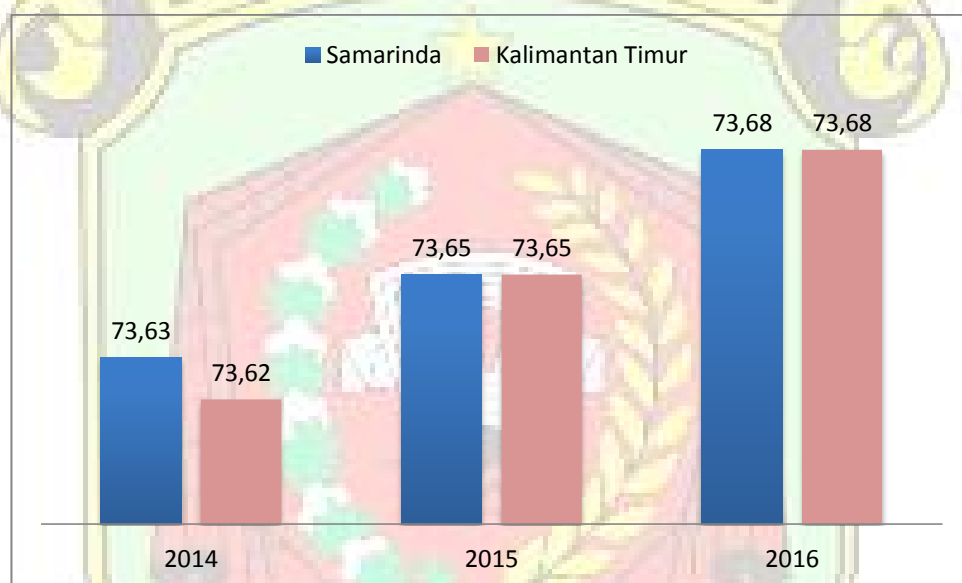
Sumber : Data diolah, 2017

Terdapat tren positif pada IPM Kota Samarinda dalam kurun 5 tahun terakhir, dimana ada kecenderungan semakin meningkat walaupun tidak terlalu signifikan. IPM Kota Samarinda selama tahun 2012-2016 berada di atas rata-rata Provinsi Kaltim.

### 3.1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. Pada negara berkembang, angka harapan hidup cenderung lebih rendah dibanding negara maju, hal ini dikarenakan adanya tingkat kematian bayi yang masih tinggi.

Angka harapan hidup di Kota Samarinda menunjukkan tren positif setiap tahun.



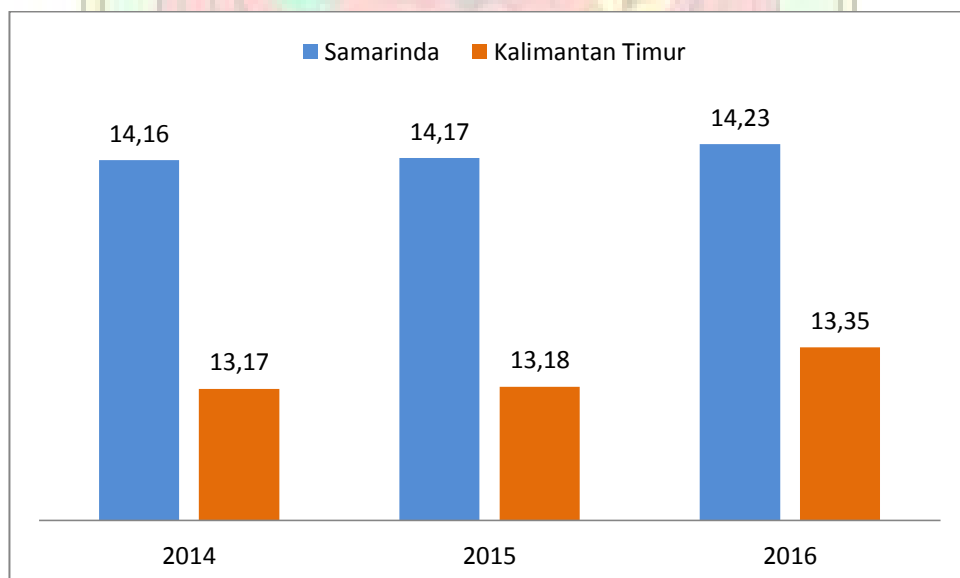
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2014-2016), angka harapan hidup di Kota Samarinda meningkat dari 73,63 menjadi 73,68. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk di Kota Samarinda akan menempuh sebanyak 73-74 tahun sejak lahir. Demi semakin meningkatkan angka harapan hidup, maka perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan terutama akses ke fasyankes dan pelayanan ibu hamil serta melahirkan. Hal ini ditujukan agar angka kematian bayi dapat diturunkan.

### 3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Kota Samarinda dengan berbagai fasilitas pendidikan yang lengkap tentu saja memiliki peluang untuk mencapai harapan lama sekolah yang tinggi. Hal ini terbukti, pada tahun 2016 angka harapan lama sekolah Kota Samarinda mampu mencapai 14,23 tahun. Artinya, anak pada umur tertentu di Kota Samarinda memiliki harapan untuk merasakan bangku sekolah selama 14-15 tahun atau sampai jenjang minimal diploma.

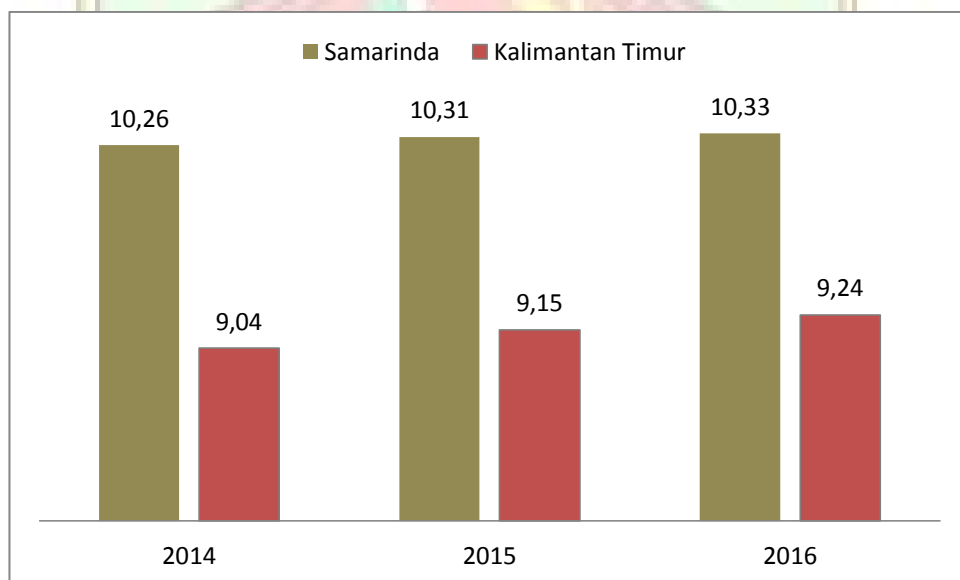
Angka harapan lama sekolah di Kota Samarinda merupakan tertinggi di Kaltim, bahkan berada di atas rata-rata provinsi sebesar 13,35 tahun. Perhatikan grafik berikut :



### 3.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

Dalam kurun waktu 2014-2016, rata-rata lama sekolah di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah mampu mencapai 10,33 tahun, yang artinya rata-rata penduduk di Kota Samarinda mengenyam pendidikan formal selama 10-11 tahun, dengan kata lain tingkat pendidikan penduduk di Kota Samarinda rata-rata berada pada jenjang pendidikan menengah.



Rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh Kota Samarinda berada di atas Provinsi Kaltim yang masih berada pada angka 9,24 tahun.

### 3.4. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level

provinsi hingga level kabupaten/kota. Penghitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Pengeluaran per kapita Kota Samarinda pada tahun 2016 mampu mencapai 14,0 juta rupiah per tahun. Angka ini berada di atas provinsi yang hanya sebesar 11,4 juta rupiah per tahun.

**Tabel 3.2. Pengeluaran Perkapita Kota Samarinda Tahun 2014-2016**

Tahun	Samarinda (ribu rupiah/orang/tahun)	Kaltim (ribu rupiah/orang/tahun)
2014	13.538	11.019
2015	13.825	11.229
2016	14.010	11.355

Sumber: BPS Kota Samarinda

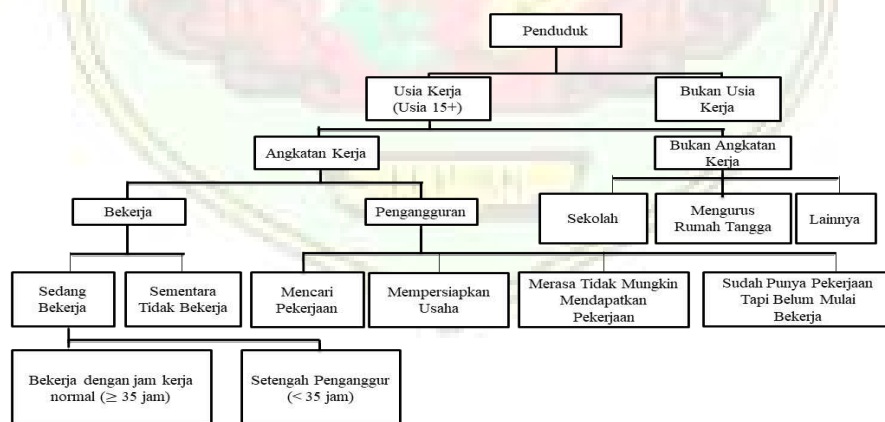
Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kota Samarinda mampu membelanjakan 14,0 juta rupiah per tahun. Dapat dikatakan kesejahteraan penduduk di ibukota provinsi ini sangat bagus.

# TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

4

## 4.1. Ketenagakerjaan

Dalam studi kependudukan (demografi), ada beberapa konsep atau definisi yang umum dipakai. Konsep atau definisi ketenagakerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data ketenagakerjaan di Indonesia merujuk pada rekomendasi *International Labor Organization (ILO)* dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment: An ILO Manual on Concepts and Methods*” (Hussmans, *et al.* 1990). Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara Internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia. Berdasarkan konsep/kerangka angkatan kerja, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok.



Gambar 2.1 Konsep Penduduk, Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran

Definisi mengenai ketenagakerjaan sebagaimana dirangkum dalam Gambar 2.1 adalah sebagai berikut (BPS, 2012; Hussmans, *et al.* 1990):

1. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia diatas 15 tahun. Penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari dua kelompok, yaitu: pertama, penduduk yang bekerja memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian; kedua, penduduk yang belum bekerja, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan (termasuk mereka yang baru pertama kali mencari pekerjaan). Pekerjaan yang tidak aktif secara ekonomi adalah mereka yang tidak bekerja atau tidak sedang mencari pekerjaan. kelompok ini tidak memproduksi barang dan jasa, dan hanya mengonsumsi barang dan jasa yang diproduksi orang lain (LDFEUI, 2011).
2. **Usia Kerja** adalah penduduk Indonesia yang menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun dan tanpa batas atas usia kerja dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Konsep angkatan kerja meruju pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu.
3. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur. Angkatan kerja terbagi menjadi dua yakni bekerja dan menganggur atau mencari pekerjaan
4. **Bekerja** didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan selama paling sedikit

1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup ,baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak berkerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya.

5. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
6. **Penganggur** adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/ definisi tersebut biasanya disebut penganggur terbuka (*open unemployment*).
  - **Setengah penganggur** merupakan penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja) dikategorikan sebagai setengah penganggur.
  - **Setengah penganggur terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
  - **Setengah penganggur sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak

menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu atau *part time worker*).

7. **Jumlah jam kerja** adalah jumlah jam kerja seluruhnya yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam istirahat resmi dan kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Dalam literatur ketenagakerjaan, digunakan beberapa indikator yang menggambarkan situasi ketenagakerjaan suatu Negara atau daerah tertentu, yaitu:

1. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

TPAK merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 +)}} \times 100\%$$

Indikator ini dapat mengidentifikasi besaran ukuran *relative* penawaran tenaga kerja (*labour supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja.

2. **Angka Penyerapan Angkatan Kerja (*Employment Rate*)**

Angka penyerapan angkatan kerja (APAK) adalah angka yang menunjukkan beberapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang menyatakan sedang bekerja pada saat pencacahan, yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{APAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

### 3. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka diukur sebagai presentasi jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Kegunaan dari Indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Yang lebih utama lagi indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia selain angka kemiskinan.

#### 4.2. **Indikator Pengangguran Terbuka**

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan, adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan pengumpulan dan penyajian data kependudukan dan ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan sensus dan survey, antara lain : Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Sakernas merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan dengan pendekatan rumah tangga.

Adapun tingkat pengangguran di Kota Samarinda tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1. Pengangguran Terbuka di Kota Samarinda Tahun 2012–2016**

Tahun	Presentase Pengangguran
2012	9,71
2013	8,57
2014	7,56
2015	5,61
2016	4,86
<b>Rata-rata Samarinda</b>	<b>7.26</b>

*Sumber : Data diolah, 2016*

Tabel tingkat pengangguran tersebut di atas menunjukkan trend yang semakin menurun dalam setiap tahunnya dalam periode 5 tahun terakhir. Rata-rata pengangguran terbuka di Kota Samarinda adalah sebesar 7,26%, tingkat pengangguran tertinggi di Kota Samarinda adalah pada tahun 2012 yaitu mencapai 9,71% dan secara konsisten

mampu menurun hampir 5% hingga di angka 4,86% pada tahun 2016. Hal ini memperlihatkan bahwa geliat perekonomian di Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan memberikan efek yang meluas. Pertumbuhan investasi dan UMKM yang semakin tinggi setiap tahun turut memberikan peran dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda.



# TINGKAT KEMISKINAN

5

Indikator kemiskinan yang digunakan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Berikut akan diuraikan kriteria garis kemiskinan versi BPS (Badan Pusat Statistik) maupun versi lain yang digunakan di Indonesia.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap Negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standard kebutuhan hidup. BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Dengan kata lain, BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pendekatan *Head Count Index*. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan *Head Count Index* merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin

adalah jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan nonmakanan (*non-food line*).

Hal penting lainnya mengenai garis kemiskinan BPS adalah berhubungan dengan tren dalam insidensi kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Tujuan dibedakannya garis kemiskinan ini adalah karena biaya hidup di kota dan di desa memang berbeda. Alasan lain adalah persentase populasi kaum miskin yang tinggal di kawasan perkotaan menurut BPS dalam kenyataan meningkat lebih cepat dari garis kemiskinan perdesaan sejak tahun 1967, sehingga di tahun 1987 garis kemiskinan perkotaan hamper 70% lebih tinggi disbanding kawasan perdesaan.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan memperbaiki kondisi mereka. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya (*reliable*) dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti: Armenia, Senegal, Pakistan,

Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minuman makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Penduduk miskin dapat juga dihitung melalui pendekatan lain, seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia yang menghitung jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran perkapita setara dengan US\$1 dan US\$2 PPP (*Purchasing Power Parity* / paritas daya beli).

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Samarinda, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013–2017**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)
2013	460.975	36.600	4,63	0,56	0,10
2014	493.763	36.650	4,56	0,35	0,04
2015	533.401	39.250	4,82	0,65	0,12
2016	566.392	38.950	4,72	0,80	0,21
2017	594.645	40.010	4,77	0,68	0,31
Rata-rata Samarinda			4,70		

Sumber : BPS Kota Samarinda

Dari data tersebut di atas terlihat dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2013 – 2017 rata-rata jumlah penduduk miskin Kota Samarinda adalah sebesar 4,70%. Apabila melihat indeks kedalaman, terjadi penurunan dari 0,80% pada tahun 2016 ke 0,68% pada tahun 2017, yang artinya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk di bawah garis kemiskinan dengan garis kemiskinan itu sendiri semakin membaik. Dapat diprediksi dengan semakin membaiknya perekonomian Kaltim serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Kota Samarinda maka tingkat kemiskinan dapat di tekan pada tahun 2018.



### 6.1. Definisi Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dari definisi tersebut terdapat dua syarat terjadinya inflasi, yaitu: kenaikan harga barang secara umum dan kenaikannya terjadi terus-menerus (Boediono, 2001; Djohanputro, 2006). Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut menyebabkan kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain. Selain itu, kenaikan harga yang terjadi hanya sekali saja, bersifat temporer atau musiman, walaupun dalam persentase yang besar juga tidak dapat dikatakan inflasi.

Penentuan parah tidaknya inflasi sangat *relative*, tidak hanya dilihat dari sudut laju inflasi saja. Siapa-siapa yang menanggung beban atau memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut perlu diperhitungkan. Sebagai ilustrasi laju inflasi 20% dapat digolongkan inflasi yang parah apabila semuanya berasal dari kenaikan harga barang-barang yang dibeli oleh golongan yang berpenghasilan rendah. Samuelson & Nordhaus (2005) mengategorikan inflasi menjadi tiga, yaitu:

1. *Low Inflation*, atau disebut juga inflasi satu digit (*single digit inflation*), yaitu inflasi dibawah 10%.
2. *Galloping Inflation*, atau *double digit* bahkan *triple digit inflation*, yang didefinisikan antara 10% sampai 200% per tahun.
3. *Hyperinflation*, yaitu inflasi diatas 200% per tahun.

Hingga kini, menerbitkan data inflasi berdasarkan **tujuan pengeluaran**. BPS (2006) mengelompokkan 744 komoditas dalam perhitungan IHK ke dalam 7 kelompok barang dan jasa sesuai **COICOP** (*Classification Of Individual Consumption by Purpose*). Ketujuh barang dan jasa tersebut adalah:

**1. Bahan makanan**

Kelompok bahan makan terdiri dari atas subkelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya; daging dan hasil-hasilnya; ikan segar; ikan diawetkan; telur, susu dan hasil-hasilnya; sayur-sayuran; kacang-kacangan; buah-buahan; bumbu-bumbuan; lemak dan minyak; dan bahan makanan lainnya.

**2. Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau**

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau terdiri atas subkelompok makanan jadi; minuman yang tidak beralkohol; serta tembakau dan minuman bralkohol

**3. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar**

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar terdiri atas subkelompok biaya tempat tinggal; bahan bakar, penerangan dan air; perlengkapan rumah tangga; dan penyelenggaraan rumah tangga

**4. Sandang**

Kelompok sandang terdiri atas subkelompok sandang laki-laki; sandang wanita; sandang anak-anak; serta barang pribadi dan sandang lain.

**5. Kesehatan**

Kelompok kesehatan terdiri atas subkelompok jasa kesehatan; obat-obatan; jasa perawatan jasmani; serta perawatan jasmani dan kosmetika.

## 6. Pendidikan

Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga terdiri atas subkelompok jasa pendidikan; kursus-kursus/pelatihan; perlengkapan/peralatan pendidikan; rekreasi; dan olahraga.

## 7. Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan

Kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan terdiri atas subkelompok transpor; komunikasi dan pengiriman; sarana dan penunjang transpor; dan jasa keuangan.

Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian.

Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk :

1. Indeksasi upah non tunjangan gaji pegawai (*wage-in-dexation*),
2. Penyesuaian nilai kontrak (*project payment*),
3. Eskalasi nilai proyek (*project escalation*),
4. Penentuan target inflasi (*inflation targeting*),
5. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*bucket indexation*),
6. Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP deflator*),
7. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*),
8. Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat

memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap.

Data inflasi di Kota Samarinda sejak 2013 sampai 2017 menunjukkan trend yang semakin menurun seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6.1. Inflasi Kota Samarinda Tahun 2013–2017**

Tahun	Inflasi (%)
2013	10,37
2014	6,74
2015	4,24
2016	2,83
2017	3,69

*Sumber : Data diolah, 2016*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat inflasi tertinggi di Kota Samarinda adalah pada tahun 2013 yang berada pada level 10,37%, kemudian secara konstan dapat dikendalikan hingga tidak melebihi 4% selama tahun 2016 dan 2017.

Secara khusus berdasarkan kelompok komoditi inflasi di Kota Samarinda pada tahun 2017 terlihat sebagai berikut:

**Tabel 6.2. Inflasi Kota Samarinda Menurut Kelompok Komoditi Tahun 2013-2017**

Kelompok Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017
Bahan Makanan	6,59	11,66	4,47	3,10	0,38
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8,56	13,24	7,26	5,19	4,32
Perumahan	2,81	10,61	7,17	1,48	5,92
Sandang	5,74	-1,79	3,20	2,40	4,36

<b>Kelompok Komoditi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kesehatan	3,52	7,59	4,56	4,85	3,16
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	4,68	9,74	3,87	3,25	2,70
Transport dan Komunikasi	1,00	12,62	11,06	0,98	3,51
<b>Umum</b>	<b>4,81</b>	<b>10,37</b>	<b>6,74</b>	<b>2,83</b>	<b>3,69</b>

Sumber: BPS Kota Samarinda

Penyebab laju inflasi di Kota Samarinda tertinggi adalah Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan Bakar sebesar 5,92%, disusul kelompok sandang dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau, masing-masing sebesar 4,36% dan 4,32%. Melihat andil inflasi tersebut, memperlihatkan bahwa masyarakat di Kota Samarinda, yang merupakan kota jasa dan perdagangan, sangat konsumtif dalam hal *property* (perumahan), sandang, dan makanan/minuman jadi.

Data laju inflasi akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana, sehingga angka inflasi sangat diperlukan dalam setiap menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan agar lebih realistis dan tajam.

# PENDAPATAN PERKAPITA

7

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Ada dua cara untuk menghitung pendapatan perkapita yaitu sebagai berikut :

**a. Berdasarkan harga yang sedang berlaku**

Jika kita menghitung pendapatan perkapita berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut **pendapatan perkapita nominal**.

**b. Berdasarkan harga tetap**

Jika dihitung berdasarkan harga tetap, hasilnya disebut dengan **pendapatan perkapita riil**.

**Pendapatan perkapita nominal** adalah pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga/inflasi. Sedangkan **pendapatan perkapita riil** adalah pendapatan perkapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga/inflasi.

Kegunaan dari penghitungan pendapatan perkapita adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun
- b. Sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dengan demikian dapat dilihat tingkat kesejahteraan pada tiap tiap negara
- c. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing masing negara dari tahun ke tahun
- d. Sebagai data pengambilan kebijakan bidang ekonomi. Adanya hasil pendapatn perkapita akan menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang ekonomi.

Bila Pendapatan Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu nilai yang disebut pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita di Kota Samarinda telah mengalami kenaikan yang cukup berarti dalam setiap tahun, ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, selain itu juga pendapatan perkapita ini akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Samarinda tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7.1. Pendapatan Perkapita Kota Samarinda Tahun 2012-2016**

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)
2012	45.906.819,00
2013	51.586.402,09
2014	57.170.277,79
2015	60.039.672,00
2016	60.598.575,00
<b>Rata-rata</b>	<b>52.300.818,18</b>

Sumber : BPS Kota Samarinda

Dari data tersebut terlihat pendapatan per kapita Kota Samarinda pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 60.598.575,00, lebih tinggi bila di bandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai Rp. 60.039.672,00. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2017 mencapai 60,5 juta rupiah per kapita per tahun.

